PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL
(Survey pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat)

ADE IRNA

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia
Jl. Dipatiukur No. 112-116 Bandung 40132

ABSTRACT

This study was conducted at 9 City of West Java Province. The phenomenon that occurs is increased revenue, but not followed by a rise in stock prices, and vice versa revenue decline was not followed by a decrease in capital expenditures.

The purpose of this study is to determine the effect of revenue and allocation of public funds to capital spending on Municipal Government of West Java Province. The method used in this research is descriptive and verification methods. The unit of analysis in this study is the realization of the annual budget report, amounting to 9 City 54 year budget report as a sample realization.

The test statistic used is the calculation of the coefficient of determination, hypothesis testing, and also use the help of an application program SPSS 16.0 for Windows. The results showed that the original income significantly positive effect on capital expenditures and general allocation fund a significant positive effect on capital expenditures at 9 City of West Java Province.

***Keywords**: Regional Revenue, General Allocation Fund, Capital Expenditure*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah yang ditandai dengan adanya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, selanjutnya Undang-undang ini diganti dan disempurnakan dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hal tersebut membawa konsekuensi logis bagi pemerintah daerah yaitu perubahan fundamental dalam hubungan tata pemerintah, hubungan keuangan serta membawa perubahan penting dalam pengelolaan pemerintah daerah, penyelenggaraan otonomi daerah disamping merupakan amanat konstitusi juga merupakan kebutuhan objektif dalam menjalankan pemerintahan saat ini, penyelenggaraan otonomi daerah harus mampu mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien yang mampu memberdayakan segenap potensi yang dimiliki daerah dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah. (Darise:2008)

Selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2004 dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia. Memutuskan: bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu direvisi dan terbitlah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sedangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah direvisi menjadi Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. (UU. RI, No.32 dan 33:2004).

Beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi otonomi daerah adalah adanya kesenjangan fiskal antar daerah dengan adanya perbedaan kesiapan daerah dalam memasuki era otonomi daerah. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah pusat memberikan bantuan (transfer) kepada pemerintah daerah, salah satunya pemberian Dana Alokasi Umum (DAU). (Laras & Adi,2008).

Sebagaimana diatur dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat (6), bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan sebagai sumber pendanaan, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaan sendiri yaitu PAD. Dana perimbangan tersebut terdiri dari: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil. (Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005)

Pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap sebagai bentuk pelayanan publik. Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya adalah memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah (Harianto 2007).

Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002).

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (Haryanto,dkk 2007).

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu wujud dari desentralisasi fiskal untuk memberikan sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya (Kurniawan, 2010).

Kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur sektor industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah (pajak merupakan salah satu komponen terbesar PAD selain retribusi yang sangat terkait dengan kegiatan sektor industri). Tingginya aktivitas investasi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pada gilirannya memberikan pemasukan yang signifikan bagi pemerintah daerah setempat (Saragih, 2003).

Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi daerah. Peran strategis pajak dan retribusi daerah memang telah memberikan kontribusi signifikan dalam sumber penerimaan PAD Akan tetapi, perannya belum cukup kuat dalam menyokong APBD secara keseluruhan. (Ahmad, 2006).

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (UU Nomor 33 Tahun 2004)

Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar-pemerintahan dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum diseluruh daerah dengan adanya transfer dana ini bagi Pemda merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaan sendiri. (Sidik 2002).

Yustikasari (2007) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara DAU dengan belanja modal. Jumlah belanja daerah dipengaruhi oleh dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat. Dengan menemukan bahwa besarnya belanja modal sangat ditentukan oleh faktor dana alokasi umum.(Adi : 2007)

Akan tetapi dengan melihat fenomena umum yang terjadi, sepertinya alokasi belanja modal belum sepenuhnya dapat terlaksana bagi pemenuhan kesejahteraan publik, sebab pengelolaan belanja daerah terutama belanja modal masih belum terorientasi pada publik. Salah satunya disebabkan oleh pengelolaan belanja yang terbentur dengan kepentingan golongan semata. Keefer dan Khemani (dalam Halim dan Abdullah, 2006:18) menyatakan bahwa adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat. Padahal menurut Pasal 66 UU No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa: “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat". UU tersebut mengisyaratkan kepada Pemda untuk mengelola keuangan daerah terutama belanja modal secara efektif, efisien, dan ekonomis dengan tujuan akhir untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Pernyataan ini sesuai dengan konsep *multi-term expenditure framework* (MTEF) yang disampaikan oleh Allen dan Tommasi (dalam Halim dan Abdullah, 2006:18) yang menyatakan bahwa kebijakan belanja modal harus memperhatikan kemanfaatan (*usefulness*) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (*budget capability*) dalam pengelolaan asset tersebut dalam jangka panjang. Hal ini berarti bahwa dalam pengelolaan asset terkait dengan belanja pemeliharaan, dan sumber pendapatan.

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal

Kota	Pendapatan Asli		Belanja Modal	
	2011	2012	2011	2012
Kota Bogor	230,449,645	211,013,607 ↓	132,952,958	259,422,527 ↑
Kota Bandung	833,254,175	755,459,217 ↓	612,081,890	1.036,657,108 ↑
Kota Cirebon	120,130,531	140,537,930 ↑	140,011,150	92,391,553 ↓
Kota Bekasi	568,344,299	557,902,282 ↓	323,903,766	682,922,676 ↑
Kota Depok	282,747,545	351,311,358 ↑	295,461,326	548,327,039 ↑
Kota Cimahi	116,677,730	110,095,908 ↓	102,870,919	152,023,261 ↑
Kota Tasikmalaya	110,369,866	112,400,065 ↑	104,450,591	63,437,962 ↓
Kota Sukabumi	115,473,387	117,584,284 ↑	56,290,978	70,287,266 ↑
Kota Banjar	45,952,392	41,829,799 ↓	151,418,341	83,916,888 ↑

Sumber : Badan Pusat Statistik 2012

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas pada tahun 2010 dan 2011 terdapat beberapa fenomena yang terjadi di Kota yang ada di Jawa Barat diantaranya terjadi fenomena yang mana terjadi peningkatan pendapatan asli daerah namun tidak di ikuti oleh belanja modal yang mana mengalami penurunan hal ini terjadi pada Kota Cirebon dan Kota Tasikmalaya. Sedangkan terdapat juga fenomena penurunan pendapatan asli daerah tetapi belanja modal malah mengalami peningkatan yang cukup besar hal ini dapat dilihat pada Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Cimahi dan Kota Banjar. Hal ini dapat dilihat bahwa terdapat permasalahan pada setiap daerah yang mana adanya kesenjangan fiscal antar daerah dengan adanya perbedaan kesiapan daerah dalam memasuki era otonomi daerah.

Tabel 1.2
Realisasi Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal

Kota	Dana Alokasi Umum		Belanja Modal	
	2011	2012	2011	2012
Kota Bogor	472,888,334	603,531,550 ↑	132,952,958	259,422,527
Kota Bandung	1,005,642,188	1,323,681,042 ↑	612,081,890	1.036,657,108
Kota Cirebon	456,586,505	552,088,263 ↑	140,011,150	92,391,553 ↓
Kota Bekasi	736,741,305	935,205,053 ↑	323,903,766	682,922,676
Kota Depok	533,766,495	674,052,719 ↑	295,461,326	548,327,039
Kota Cimahi	354,745,460	440,860,307 ↑	102,870,919	152,023,261
Kota Tasikmalaya	476,087,274	582,124,220 ↑	104,450,591	63,437,962 ↓
Kota Sukabumi	330,723,383	401,102,986 ↑	56,290,978	70,287,266
Kota Banjar	235,862,566	281,851,254 ↑	151,418,341	83,916,888 ↓

Sumber : Badan Pusat Statistik 2012

Berdasarkan Tabel 1.2 realisasi tahun 2010 dan 2011 di atas, di Jawa Barat terdapat fenomena yang mana terjadi peningkatan dana alokasi umum tetapi tidak diikuti oleh belanja

modal yang malah mengalami penurunan diantaranya terjadi di Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar yang mengalami penurunan belanja modal. Dana alokasi umum ini merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu. Adapun tujuan transfer ini untuk mengurangi kesenjangan fiscal antar pemerintahan dan menjamin tercapainya standar pelayanan public minimum diseluruh daerah. Peningkatan dana alokasi umum ini disebabkan karena kapasitas fiskal di daerah tersebut rendah (Badan Pusat Statistik,2012). Kapasitas fiskal adalah sejumlah pendapatan yang dapat dihasilkan oleh suatu Negara/Daerah. (Robert Simanjuntak, 2002).

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **"Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat".**

1.2 Rumusan Masalah

Beberapa masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian tentang peranan optimalisasi pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal antara lain:

1. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Provinsi Jawa Barat.
2. Seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Provinsi Jawa Barat.
3. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Provinsi Jawa Barat secara simultan.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh data Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota Provinsi Jawa Barat.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis *(Applied Research)*

Dapat dijadikan masukan untuk membantu pemerintah daerah terutama untuk melihat peranan pendapatan asli daerah terhadap belanja modal untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.

Diharapkan dapat memberikan informasi tentang peranan PAD dan DAU terhadap belanja modal dalam menentukan asset daerah, sehingga dapat dijadikan acuan untuk pengadaan asset daerah sebagai investasi, dalam rangka membiayai pelaksanaan otonomi daerah yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.4.2 Kegunaan Akademis *(Basic Research)*

1. Bagi pengembangan Ilmu Akuntansi
   Diharapkan dapat memberikan informasi serta dapat dijadikan referensi mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.
2. Bagi Peneliti
   Memberikan informasi dan kontribusi yang berguna untuk pengembangan penelitian sektor publik terutama dalam hal Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.
3. Bagi Peneliti Lain
   Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan,

umumnya mengenai dunia sektor publik, khususnya mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pemerintah Kota Bandung serta sebagai bahan referensi untuk penelitian dalam bidang yang sama.

1.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pengambilan data dilakukan di Badan Pusat Statistik Jawa Barat, yang beralamat di jalan PHH Mustofa No. 43 Bandung 40124, Telp. /Fax: (022)7272595, 7201696/7213572, E-mail: bps3200@bps.go.id

1.5.2 Waktu Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis membuat rencana jadwal penelitian yang secara rinci waktu penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.3 dibawah ini:

II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran Dan Hipotesis

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah menurut Ahmad Yani (2009:51) yaitu:

" Pendapatan Asli Daerah Merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi".

2.1.2 Dana Alokasi Umum

Menurut Deddi Nordiawan, Iswahyudi & Maulidah Rahmawati (2008:56) menjelaskan Dana Alokasi Umum sebagai berikut:

"Dana Alokasih Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi".

2.1.3 Belanja Modal

Sedangkan menurut Halim & Kusufi (2012:107) yang dimaksud dalam Belanja Modal adalah:

"Belanja Modal merupakan pengeluaran untuk perolehan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari periode akuntansi. Belanja modal termasuk, 1) belanja tanah, 2) belanja peralatan dan mesin, 3) belanja modal gedung dan bangunan, 4) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, 5) belanja aset tetap lainnya."

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat (13), adalah :

" Pendapatan Daerah adalah semua pihak yang diakui sebagai penamba nilai kekayaan bersi dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan".

PAD merupakan pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber penerimaan murni daerah. PAD dipergunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk itu, PAD harus diupayakan agar selalu meningkat seiring dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, sejak Indonesia merdeka sampai saat ini pajak daerah dan retribusi daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah. Akan tetapi, secara umum untuk kabupaten/kota, besarnya kontribusi dari pajak daerah dan retribusi daerah terhadap APBN sangat bervariatif sesuai potensi yang dimiliki daerah masing-masing.

Dana alokasi umum menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 adalah :

"DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi".

Dana alokasi umum (DAU) diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. DAU bersifat *"Block Grant"* yang berarti

penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Dana alokasi umum (DAU) dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) *Netto* yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Belanja modal menurut Deddi Nordiawan (2010:71) adalah :

" Belanja modal merupakan penngeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah jumlah asset atau kekayaan organisasi sektor publik, yang selanjudnya akan menambah anggaran operasional untuk biaya pemeliharaan".

Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni membangun sendri, menukarkan dengan aset tetap lain, dan membeli. Namun, untuk kasus dipemerintahan biasanya cara yang dulakukan dengan cara membeli. Proses pembelian yang dilakukan umumnya dilakukan melalui sebuah proses lelang atau teneder yg cukup rumit.

2.2.1 Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal

Selama ini menurut Mardiasmo (2002:46) Pendapatan Asli Daerah memiliki peran untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah guna mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yang ingin meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah.

Berdasarkan buku teori Bahtiar Arif, Muchlis dan iskandar (2009:171) menyatakan:

"Pendapatan merupakan bagian utama dari suatu anggaran, baik untuk entitas bisnis maupun pemerintahan. Anggaran pendapatan merupakan target yang akan dicapai untuk membiayai anggaran belanja-belanja diantaranya termasuk belanja modal"

Hal ini sesuai dengan PP No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Artinya, disetiap penyusunan APBD, jika Pemda akan mengalokasikan belanja modal maka harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya PAD. Sehingga jika Pemda ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan belanja modal, maka Pemda harus berusaha keras untuk menggali PAD yang sebesar-besarnya.

2.2.2 Hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal

Menurut Saragih (2003:49) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebenarnya merupakan andalan utama daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. (2003:55) Tetapi menurut Saragih penerimaan daerah dari unsur Pendapatan Asli Daerah saja belum mampu memenuhi kebutuhan daerah apalagi dengan penambahan wewenang daerah jelas akan membutuhkan dana tambahan bagi daerah sehingga daerah masih tetap membutuhkan bantuan atau dana yang berasal dari pusat. Bantuan pusat ini biasa disebut dengan Dana Alokasi Umum (DAU).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Saragih (2006:6) menyatakan :

"Setiap transfer DAU yang diterima daerah akan ditujukan untuk belanja pemerintah daerah,maka tidak jarang apabila pemerintah daerah menetapkan rencana daerah secara pesimis dan rencana belanja cenderung optimis supaya transfer DAU yang diterima daerah lebih besar, Berbagai pemaparan ini menunjukkan bahwa besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) akan memberikan dampak yang berarti bagi peningkatan Belanja Modal. Dengan demikian Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal"

Hubungan positif yang kuat antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan belanja modal ini dapat dipahami mengingat bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan melalui belanja modal juga ikut dibiayai oleh Dana Alokasi Umum (DAU) tersebut. Bahkan Abdullah dan Halim (2006:26) menyatakan bahwa pendapatan dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan di pemerintah daerah di Indonesia merupakan sumber pendapatan utama dalam APBD. Sayangnya kontribusi Dana Alokasi Umum

(DAU) terhadap belanja modal masih belum efektif sehingga masih banyak daerah yang belum merata pembangunannya, juga masih kurangnya pelayanan publik sehingga kesejahteraan masyarakat pun belum efektif (masih banyaknya masyarakat dibawah garis kemiskinan, belum meratanya fasilitas pendidikan dan kesehatan, sector usaha kecil masih terabaikan –contoh PKL).

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011:64), hipotesis penelitian adalah sebagai berikut :

"Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu data statistic yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Pada penelitian kualitatif, tidak dirumuskan hipotesis, tetapi justru diharapkan dapat ditemukan di hipotesis. Selanjutnya hipotesis tersebut akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif**".**

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

"Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh Terhadap Belanja Modal".

H.1 Pendapatan asli daerah berhubungan signifikan dengan dana alokasi umum .

H.2 Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

H.3 Biaya Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum kualitas dan biaya produksi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

III Objek dan Metode penelitian

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian menurut Husein Umar (2005:303) adalah:

"Menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap perlu".

Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum sebagai variabel bebas dan Belanja Modal pada Pemerintah Kota Provinsi Jawa Barat.

3.2 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono dalam Umi Narimawati, Sri Dewi Anggadini, dan Linna Ismawati, (2010:29) metode deskriptif adalah:

"Metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas".

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif, yaitu hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk menekankan analisisnya pada data-data *numeric* (angka), dengan menggunakan metode ini akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran objek yang diteliti.

3.2.1 Desain Penelitian

Desain penelitian dilakukan agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan baik dan sistematis. Desain penelitian merupakan hal yang penting karena dapat dijadikan pedoman dalam melakukan penelitian.

Desain penelitian menurut Husein Umar (2011:54) adalah sebagai berikut:

"Desain Penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang dibuat sedemikian rupa agar diperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian".

Langkah-langkah desain penelitian menurut Umi Narimawati, Sri Dewi, dan Linna Ismawati (2010:30) adalah:

1. Menetapkan permasalahan sebagai indikasi dari fenomena penelitian, selanjutnya menetapkan judul penelitian.
2. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi.

3. Menetapkan rumusan masalah.
4. Menetapkan tujuan penelitian.
5. Menetapkan hipotesis penelitian.
6. Menetapkan konsep variabel.
7. Menetapkan sumber data, teknik penentuan sampel dan teknik pengumpulan data.
8. Melakukan analisis data.
9. Menyusun laporan hasil penelitian.

3.2.2 Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis dan indikator dari variable variabel yang terkait dalam penelitian ini.Variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian ini yaitu:

1. Variabel Bebas (*Independent Variable*)
   Variabel bebas atau variable independen adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Sesuai dengan judul yang peneliti ajukan, maka yang menjadi variabel bebas (variabel X) yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum.
2. Variabel Dependen
   Variabel dependen atau variable terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen (variable Y) dalam penelitian ini yaitu belanja modal.

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

3.2.3 Sumber dan Teknik Penentuan Data

3.2.3.1 Sumber Data

Sumber data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder yaitu berupa laporan realisasi anggaran.

Data primer menurut Jonathan Sarwono (2006:209) adalah:

"Data primer berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya. Data dapat direkam atau dicatat oleh peneliti."

3.2.3.2 Teknik Penentuan Data

Adapun teknik penentuan data terbagi menjadi dua bagian, yaitu populasi dan sampel.

1. **Populasi**

Menurut Sugiyono (2010:215) populasi adalah:

"Wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya."

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran 9 kota provinsi jawa barat dari tahun 2007-2012 sebanyak 6 tahun. Yaitu pada Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bekasi, Kota Banjar,Kota Cimahi,Kota Cirebon,Kota Depok,Kota Sukabumi, dan Kota Tasikmalaya.

2. **Sampel**

Menurut Sugiyono (2010:81) mengemukakan bahwa:

"Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut".

Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling* jenuh.

Pengertian dari *sampling* jenuh atau sensus menurut Sugiyono, adalah: "Sampling jenuh atau sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel".

Sampel dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran 9 kota Provinsi Jawa Barat dari tahun 2007-2012 sebanyak 6 tahun. Yaitu pada Kota Bogor, Kota Bandung, Kota

Bekasi, Kota Bekasi, Kota Banjar,Kota Cimahi,Kota Cirebon,Kota Depok,Kota Sukabumi, dan Kota Tasikmalaya.

3.2.3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang akan diteliti yaitu dilakukan dengan cara:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung diinstansi yang menjadi objek penelitian. Data yang diperoleh merupakan data sekunder yang diperoleh dengan cara:

a. Observasi (Pengamatan Langsung), yaitu melakukan pengamatan secara langsung dilokasi untuk memperoleh data yang diperlukan yaitu melalui pengumpulan data langsung pada Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Barat.
b. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mencatat data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari dokumen-dokumen yang dimiliki Pemerintah Daerah. Adapun dokumen yang digunakan sebagai alat penelitian.

2. Penelitian Kepustakaan *(Library Research)*

Penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku di perpustakaan dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan diteliti oleh penulis.

3.2.4 Rancangan Analisis

Rancangan analisis merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh. Peneliti melakukan analisa terhadap data yang telah diperoleh dengan menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif.

1. Analisis Kualitatif

Menurut Sugiyono,(2009:14) analisis kualitatif adalah:

"Metode penelitian kualitatif itu dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama dilapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan dilapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail."

2. Analisis Kuantitatif

Menurut Sugiyono, (2009:31) analisis kuantitatif adalah:

"Dalam penelitian kuantitatif analisis data menggunakan statistik. Statistik yang digunakan dapat berupa statistik deskriptif dan inferensial/induktif. Statistik inferensial dapat berupa statistik parametris dan statistik nonparametris. Peneliti menggunakan statistik inferensial bila penelitian dilakukan pada sampel yang dilakukan secara random. Data hasil analisis selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan. Penyajian data dapat berupa tabel, tabel ditribusi frekuensi, grafik garis, grafik batang, *piechart* (diagram lingkaran), dan pictogram. Pembahasan hasil penelitian merupakan penjelasan yang mendalam dan interpretasi terhadap data-data yang telah disajikan".

a. Pengujian Asumsi Klasik Regresi

Untuk memperoleh hasil yang lebih akurat pada analisis regresi berganda maka dilakukan pengujian asumsi klasik agar hasil yang diperoleh merupakan persamaan regresi yang memiliki sifat *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE).

Beberapa asumsi klasik regresi yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum menggunakan analisis regresi berganda (*Multiple Linear Regression*) sebagai alat untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel yang diteliti terdiri atas:

1. Uji Normalitas Data Residual

Uji normalitas menurut Imam Ghozali (2007:110), "Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik."

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkolerasi kuat di antara sesama variabel independen maka konsekuensinya adalah:

a) Koefisien-koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir.

b) Nilai standar *error* setiap koefisien regresi menjadi tidak terhingga.

3. Uji Heteroskedastisitas

Situasi heteroskedastisitas akan menyebabkan penaksiran koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien dan hasil taksiran dapat menjadi kurang atau melebihi dari yang semestinya.

Dengan menggunakan program SPSS, heteroskedastisitas juga bisa dilihat dengan melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SDRESID. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, maka telah terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika tidak membentuk pola tertentu yang teratur, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi yang akan dibentuk ditemukan adanya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode *t* (sesudah) dengan kesalahan pengganggu pada periode *t*-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik seharusnya terbebas dari masalah autokorelasi (Ghozali, 2012:110). Autokorelasi dapat dideteksi dari nilai *Durbin-Watson* (D-W), dengan kriteria pengujian apabila nilai D-W berada diantara angka 1 dan 3 dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari masalah autokorelasi (Sarwono, 2012:28).

b. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai indikator. Analisis ini digunakan dengan melibatkan variabel dependen (Y) dan variabel independen (X1 dan X2). Persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = a+b_1X_1+b_2X_2$$

Sumber : Sugiyono(2009:192)

Dimana:

Y = variabel tak bebas (belanja modal)
a = bilangan berkonstanta
b1,b2 = koefisien arah garis
X1 = variabel bebas X1 (pendapatan asli daerah)
X2 = variabel bebas X2 (dana alokasi umum)

c. Analisis Korelasi

Interprestasi dari nilai Koefisien korelasi

a. Kalau r = -1 atau mendekati -1, maka hubungan antara kedua variabel kuat dan mempunyai hubungan yang berlawanan (jika X naik maka Y turun atau sebaliknya).
b. Kalau r = +1 atau mendekati +1, maka hubungan yang kuat antara variabel X dan variabel Y dan hubungannya searah.

d. Koefisiensi Determinasi

Analisis Koefisiensi Determinasi (KD) digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam persentase.

Besarnya koefisien determinasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$R = r^2$$

Sumber: Andi Supangat (2007:341)

Dimana:

R = koefisien determinasi

r^2 = kuadrat koefisien korelasi

adapun untuk menghitung koefisien determinasi dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Adapun rumus Zero-Order menurut Kusnendi (2006:17) yaitu:

Kd = Beta X Zero-Order

3.2.5 Pengujian Hipotesis

Pada prinsipnya pengujian hipotesis ini adalah membuat kesimpulan sementara untuk melakukan penyanggahan dan atau pembenaran dari masalah yang akan ditelaah. Sebagai wahana untuk menetapkan kesimpulan sementara tersebut kemudian ditetapkan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Langkah-langkah dalam analisisnya sebagai berikut:

1. Uji Statistik t

Pengujian secara parsial dan secara simultan menggunakan uji t

1. Pengujian Secara Simultan
   a. Melakukan uji F untuk mengetahui pengaruh seluruh variable bebas secara simultan terhadap variable terikat. Jika nilai $F_{hitung} > F_{kritis}$, maka H_0 yang menyatakan bahwa variasi perubahan nilai variable bebas tidak dapat menjelaskan perubahan nilai variable terikat ditolak dan sebaliknya.
   b. Hipotesis

      H_0 ;β = 0, *Pengaruh Pendapatan asli Daerah Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal*

      H_1 ;β ≠ 0, *Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal.*

      H_0ditolak apabila $F_{hitung} > F_{kritis}$ (α = 0,05)
2. Pengujian Secara Parsial

   Melakukan uji t untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variable terikat.

   Kriteria pengakuannya yaitu sebagai berikut:

   H_0 ditolak apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ (α = 0,05)

   Jika menggunakan tingkat kekeliruan (α = 0,01) untuk diuji dua pihak, maka kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis yaitu sebagai berikut :

   a) Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka$H_o$ada di daerah penolakan, berarti $H_a$diterima artinya antara variabel X dan variabel Y ada hubungannya.
   b) Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_o ada di daerah penerimaan, berarti H_a ditolak artinya antara variabel X dan variabel Y tidak ada hubungannya.
3. Penarikan Kesimpulan

   Daerah yang diarsir merupakan daerah penolakan, dan berlaku sebaliknya.Jika t_{hitung} dan F_{hitung} jatuh di daerah penolakan (penerimaan), maka Ho ditolak (diterima) dan Ha diterima (ditolak).Artinya koefisian regresi signifikan (tidak signifikan).

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Analisis Verifikatif

Dalam penelitian ini, untuk mencari pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada 9 Kota Provinsi Jawa Barat, akan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, yang kemudian dilanjutkan dengan pengujian korelasi, koefisien determinasi dan uji hipotesis baik secara simultan (Uji *F*) maupun secara parsial (Uji *t*).

4.1.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik terdiri dari beberapa langkah pengujian, yaitu sebagai berikut:

a. Uji Normalis

Berdasarkan metode *Kolmogorov-Smirnov, nilai* signifikansi yang diperoleh nilai residual sebesar 0,437. Nilai ini berada di atas 0,05 yang menunjukan bahwa nilai residual yang dalam data berdistribusi secara normal, sehingga asumsi normalitas data terpenuhi.

b. Uji Multikolinieritas

Nilai *tolerance* yang diperoleh kedua variabel bebas masing-masing sebesar 0,182 > 0,1 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10. Hal ini menandakan bahwa kedua variabel bebas yang digunakan tidak memiliki masalah multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser. Dari data yang disajikan terlihat bahwa nilai signifikansi yang diperoleh kedua variabel lebih besar dari 0,05 yaitu PAD sebesar 0,072 > 0,05 dan DAU sebesar 0,440 > 0,05 yang menunjukan bahwa varians residual dalam data bersifat homokedastisitas, sehingga asumsi heteroskedastisitas terpenuhi.

d. Uji Autokorelasi

Berdasarkan Tabel Durbin-Watson, diperoleh nilai sebesar 1,795. Karena nilai DW berada di antara rentang 1,641 sampai 2,359 maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

4.1.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil pengolahan data pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal pada pemerintah Provinsi Jawa Barat di peroleh hasil regressi sebagai berikut.

Tabel 4.1
Persamaan Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-55275089,752	34062724,077		-1,623	,111
	PAD	,506	,147	,468	3,436	,001
	DAU	,372	,109	,464	3,407	,001

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Berdasarkan hasil perhitungan pada table di atas, diperoleh bentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$\mathbf{Y= -55275089{,}752 + 0{,}506X1 + 0{,}372X2}$$

Nilai koefisien regresi pada variabel-variabel bebasnya menggambarkan apabila diperkirakan variabel bebasnya naik sebesar satu unit dan nilai variabel bebas lainnya diperkirakan konstan atau sama dengan nol, maka nilai variabel terikat diperkirakan bisa naik atau bisa turun sesuai dengan tanda koefisien regresi variabel bebasnya.

a. Konstanta (a) sebesar -55275089,752 artinya PAD (X_1) dan DAU (X_2) nilainya 0 (nol) dan tidak ada perubahan, maka belanja modal (Y) bernilai sebesar -55275089,752 rupiah.
b. Koefisien regresi variable PAD (X_1) sebesar 0,506, artinya jika Pendapatan Asli Daerah meningkat satu rupiah, sementara DAU konstan, maka belanja modal (Y) akan meningkat sebesar 0,506 rupiah.
c. Koefisien regresi variabel DAU (X_2) sebesar 0,372, artinya jika DAU meningkat satu rupiah, sementar PAD konstan, maka belanja modal (Y) akan meningkat sebesar 0,372 rupiah.

Pembahasan

1. Pendapatan Asli daerah (X_1) Terhadap Belanja Modal (Y)

Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal dilihat dari indicator yang digunakan. Besarnya pengaruh pendapatan asli daerah (X_1) terhadap belanja modal (Y) secara parsial sebesar 41,6%

Hasil dari pengujian nilai $t\text{-}_{hitung}$ yang diperoleh variabel pendapatan asli daerah sebesar 3,436. untuk pengujian dua sisi diperoleh nilai t tabel sebesar ±2,008. Dari nilai di atas terlihat bahwa t-hitung untuk pendapatan asli daerah sebesar 3,436, berada diluar nilai t-tabel (-2,008 dan 2,008), sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi secara signifikan terhadap Belanja Modal, hal ini terjadi PAD memberikan kontribusi yang besar terhadap pembiayaan belanja modal karena dananya relatif besar, sehingga memenuhi belanja modal. Dimana PAD masih menjadi dana utama untuk membiayai belanja daerah. Bermula dari keinginan untuk mewujudkan harapan tersebut, Pemerintah Provinsi melakukan berbagai cara dalam meningkatkan pelayanan publik, yang salah satunya dilakukan dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal.

2. Dana Alokasi Umum (X_2) Terhadap Belanja Modal (Y)

Untuk mengetahui Dana alokasi umum terhadap Belanja Modal dilihat dari indikator yang mempengaruhinya. Besarnya pengaruh dana alokasi umum (X_2) terhadap belanja modal (Y) secara parsial adalah sebesar 41,2%

Hasil dari pengujian nilai $t\text{-}_{hitung}$ yang diperoleh variabel dana alokasi umum sebesar 3,407 untuk pengujian dua sisi diperoleh nilai t-tabel sebesar ±2,008. Dari nilai di atas terlihat bahwa t-hitung untuk dana alokasi umum sebesar 3,407, berada diluar nilai t-tabel (-2,008 dan 2,008), sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Hasil dari koefisien determinasi pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal Pemerinta Kota Provinsi Jawa Barat secara simultan memberikan kontribusi sebesar 82,8%, sedangkan sisanya sebesar 17,2% merupakan kontribusi dari faktor lain yang tidak diteliti, seperti dana alokasi khusus, sisa lebih pembiayaan anggaran, luas wilayah dan PDRB

Hasil nilai korelasi simultan yang diperoleh sebesar 0,910. Mengacu pada peda pedoman interpretasi korelasi menurut Narimawati (200787), nilai korelasi sebesar 0,910 termaksud dalam kategori hubungan yang kuat berada pada interval “0,800 – 1,000”. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara simultan dengan belanja modal pada Pemerintah Kota Provinsi Jawa Barat.

V. Kesimpulan dan Saran

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal 9 Kota Provinsi Jawa Barat maka pada bagian akhir dari penelitian ini penulis menarik kesimpulan, sekaligus memberikan saran sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil penelitian dan realisasi Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal dan Dana Alokasi Umum positif dan signifikan pengaruh yang kuat terhadap Belanja Modal pada 9 Kota Provinsi Jawa Barat.
2. Berdasarkan hasil penelitian dan realisasi Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki hubungan yang kuat dengan belanja modal karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU)

memberikan pengaruh yang kuat terhadap belanja modal pada 9 Kota Provinsi Jawa Barat.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus terus meningkatkan PADnya dengan cara meningkatkan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah dibandingkan dengan DAU Dengan tingginya PAD tersebut maka akan semakin mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pusat.
2. Sebaiknya Pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih tingkatkan jumlah belanja modal dan memprioritaskan anggaran untuk kepentingan publik dengan cara. Mengurangi ketergantungan atas transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat. Sebab dengan meningkatnya alokasi belanja modal akan semakin meningkatkan investasi yang nantinya akan meningkatkan produktivitas masyarakat, sehingga akan kembali pada meningkatnya pendapatan daerah. Akan tetapi Pemerintah provinsi juga harus efektif dan efisien dalam menentukan alokasi belanja modal, sebab dengan tingginya belanja modal tersebut akan mengakibatkan biaya rutin lainnya (biaya pemeliharaan) menjadi lebih tinggi.

Daftar Pustaka

Abdul Halim. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat

Abdul Halim. 2007. *Akuntansi sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3 . Jakarta : Selemba Empat

Ahmad, Waluya Jati 2006. *Peranan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah* (Studi Pada Daerah Tingkat II Di Jawa Timur). Jurnal Humanity, Vol 2 Tahun 2006, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang.

Ahmad Yani. 2009. *Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia* Edisi-Revisi 4. Jakarta : Rajawali Pers.

Andi Supangat. 2007. *Statistika Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametrik*. Jakarta: Kencana.

Askam Tuasikal. 2008. *Pengaruh DAU,DAK,PAD dan PDRB terhadap Belanja Modal* (Studi Pada Universitas Patimura Ambon)

Bahtiar, Arif, Muchlis dan Iskandar. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Akademia.

Darise. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik).* Indeks. Jakarta.

Darwanis, Mawarni, dkk. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah* (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Aceh) : ISSN 2302-0164

Deddi, Ismayudi, dkk. 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Selemba Empat

Halim dan Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta Selemba Empat

Harianto D., 2007. *Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Perkapita*. Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar.

Kusnandar, Dodik. 2011. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal* (Studi pada Jawa dan Bali)

Kusnendi. 2005. *Analisis Jalur Konsep & Aplikasi dengan Program SPSS & LISLER 8*. Bandung Penerbit Jurusan Pendidikan Ekonomi (JPG) FPIPS

Laras, Wulandari & Adi, Priyo Hari 2008, *Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah terhadap Transfer Pemerintah Pusat. The 2nd National Conference UKWMS*. Surabaya, 6 September 2008.

Liyoni Arista. 2012 *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal* (Studi Pada Pemerintah Kota Gorontalo.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi sektor Publik*. Yogyakarta : Andi

Nordiawan, Ayuningtias, Deddi. 2010. *Akuntansi Sektor Publik* . Edisi 2.Jakarta : Selemba Empat.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tentang Retribusi Daerah.

Saragih. 2006. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Selemba Empat

Saragih, J. P., 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia.

Sidik, Machfud 2002, *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*. Makalah disampaikan dalam acara Orasi Ilmiah. Bandung, 10 April 2002.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1947 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Lampiran-Lampiran

Tabel Lampiran

Tabel 1 (Normalitas)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		54
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	79257388,51482
Most Extreme Differences	Absolute	,118
	Positive	,064
	Negative	-,118
Kolmogorov-Smirnov Z		,869
Asymp. Sig. (2-tailed)		,437

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Tabel 2 (Heteroskedastisitas)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16764545,564	16915289,197		,991	,326
	PAD	,134	,073	,462	1,839	,072
	DAU	,042	,054	,195	,778	,440

a. Dependent Variable: Absolut

Tabel 3 (Multikolinieritas)

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PAD	,182	5,493
	DAU	,182	5,493

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Tabel 4 (Autokorelasi)

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,910[a]	,828	,821	80796510,6279	1,795

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Tabel 5 (Regresi Linier Berganda)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-55275089,752	34062724,077		-1,623	,111
	PAD	,506	,147	,468	3,436	,001
	DAU	,372	,109	,464	3,407	,001

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Tabel 6 (Analisis Korelasi)

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,910[a]	,828	,821	80796510,6279

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Tabel 7

Correlations

		Belanja Modal
PAD	Pearson Correlation	,888
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	54
DAU	Pearson Correlation	,888
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	54

Tabel 8 (Analisis Koefisien Determinasi)

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,910[a]	,828	,821	80796510,6279

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Tabel 9

Coefficients[a]

Model		Standardized Coefficients	Correlations
		Beta	Zero-order
1	PAD	,468	,888
	DAU	,464	,888

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Tabel 10 (Uji Simultan (Uji F))

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,599E+18	2	7,996E+17	122,487	,000[b]
	Residual	3,329E+17	51	6,528E+15		
	Total	1,932E+18	53			

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), DAU, PAD

Tabel 11 (Uji Parsial (Uji t))

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-55275089,752	34062724,077		-1,623	,111
	PAD	,506	,147	,468	3,436	,001
	DAU	,372	,109	,464	3,407	,001

a. Dependent Variable: Belanja Modal